

**IMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA GADING KENCANA DALAM
PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

(Skripsi)

Oleh

SYAIFULLOH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA GADING KENCANA DALAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

Oleh

SYAIFULLOH

Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat ini didasarkan atas rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sehingga berdasarkan pra riset dan pengamatan peneliti sebelumnya mendapatkan hasil bahwa pemekaran Desa Gading Kencana memiliki unsur politik. Hal ini di tegaskan lagi dengan *statement* mayoritas masyarakat yang mengatakan ” kami bukan memekarkan diri melainkan kami dimekarkan”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yang di dasarkan pada data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dari Dimensi Politik terdapat intervensi politik yang kuat dari pemerintah Daerah dan elit politik masyarakat untuk memekarkan

desa Gading Kencana, dimensi administrasi pemekaran desa Gading Kencana sudah memenuhi syarat administrasi. Akan tetapi kelayakan tersebut dikarenakan gabungan antara Desa Marga Kencana dan Desa Karta Sari, Dari Dimensi Kesenjangan Wilayah Pemekaran Desa Gading Kencana membuat rentang kendali Semakin Baik, serta akan Memberikan pelayanan yang lebih efektif indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Pemekaran Desa Gading Kencana baru menunjukkan peningkatan pada bidang Infrastruktur jalan raya. Akan tetapi Pemekaran tersebut Belum menunjukkan adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan belum terdapat peningkatan pada pendapatan dan perekonomian masyarakatnya.

kata kunci : Politik, Pemekaran Desa. Sosial Ekonomi.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF VILAGE EXPANSION AT GADING KENCANA VILLAGE IN INCREASING SOCIAL ECONOMIC SOCIETY

By

Syaifulloh

The implementation of Village expansion at Gading kencana village in increasing social economic society was based on local government plan of tulang bawang barat regency. Based on previous studies and researcher observation found that there was political influence in expanding gading kencana village. It was confirmed by almost inhabitants in gading kencana, they said that "we are not expanding this village, but we are expanded by the government". The aim of this study is to find out how the implementation of village expansion at gading kencana village in increasing social economic society. Design used was descriptive qualitative research design.

The findings of this research were: from policy dimension, there was policy intervention from local government and political elite inhabitants in expanding Gading Kencana village; from administration dimension, the researcher found that administration requirements of Gading Kencana village had been completed. It

happened because there was merger between marga kencana village and karta sari village. From dimension of discrepancy region, the researcher found that gading kencana village made control span and they will change the service to be more effective. Indicator of Social economic society, it only showed the increase of highway infrastructor. But, this expansion had not showed the increase of society service and the increase of society income yet.

Keywords: policy, expansion village, social economy.

**IMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA GADING KENCANA DALAM
PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT**

Oleh

SYAIFULLOH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PEMEKARAN
DESA GADING KENCANA DALAM
PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : Syaifulloh

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316021078

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

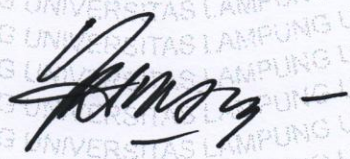
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.

Penguji Utama

: Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 April 2017

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 17 April 2017
Yang Membuat Pernyataan,



Syaifulloh
NPM 1316021078

RIWAYAT HIDUP



Syaifulloh, dilahirkan di Way Isem pada tanggal 16 Mei 1994, anak dari pasangan Bapak Dirmansyah dan Ibu Yentina. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara.

Jenjang akademis penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri Way Isem pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ma'Arif Almunawaroh Dayamurni dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung dengan mengikuti Bidikmisi dan tes seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

Penulis sangat meyakini bahwa pengembangan diri sebagai manusia harus dicari dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah pengalaman dalam hidup kita dimasa depan. Penulis, banyak mendapatkan hal-hal yang baru serta bermanfaat dalam menjalani proses sebagai seorang mahasiswa yang aktif di beberapa lembaga organisasi kampus/non kampus, antara lain:

1. Ketua Forum Komunikasi Bidikmisi FISIP UNILA 2013
2. Kepala Bidang Kajian Penelitian dan Analisis UKM- Komunitas Integritas UNILA 2015

3. Ketua Umum Lampung Cerdas 2014
4. Ketua Umum Yout Inspiration Indonesia 2015
5. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tulang Bawang Barat 2016

Selain mengikuti organisasi kampus dan non kampus penulis juga pernah mengikuti beberapa sertifikasi, antara lain:

1. Certified Instructor Hypnotherapy (CI) from Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH)
2. Certified Hypnotherapy (CHt) from Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH)
3. Certified Hypnosis (CH) from Indonesian Board of Hypnotherapy (IBH)
4. Certified NLP Practitioner from Neo NLP Indonesia
5. Certified NLP Master Practitioner from NLP Indonesia
6. Certified Mapping Telent Indonesia

Pada tahun 2016, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan (KKNK) UMRAH di Kampung Kelam Pagi Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

MOTTO

“Ingatlah, Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat”

{QS. Baqorah, 214}

**”Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”**

(Al-Baqorah, 154)

**”Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib
Sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada
Pada diri mereka sendiri”**

(Ar-ra’d, 11)

**”Menangis karena berkorban itu lebih mengharukan,
dari pada menangis karena penyesalan”**

(Syaifulloh)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

**Kupersembahkan hasil karya yang sederhana ini
untuk orang-orang yang luar biasa dalam hidupku:**

“Ayahanda dan Ibunda tercinta”

yang telah mempersembahkan
arti kehidupan melalui jerih payah, peluh keringat, rintihan, nasehat dalam proses
hidup yang cukup panjang..
serta selalu memberikan curatan kasih sayang, dukungan, dan doa serta restu yang
tiada hentinya hingga sekarang dan sampai nanti .

“Adik-Adik Ku”

Madian Azhar dan Wilda Yanti

Terima kasih atas curahan kasih sayang dan bantuan yang telah kalian berikan.

Seluruh **keluarga besarku** dan sahabat terbaik yang selalu memberi
warna dan pelajaran padaku, dari yang mengajarkanku arti hidup
sampai membantu dalam proses penyusunan karya yang sederhana ini

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu
Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan
dari Allah SWT

“ALMAMATER TERCINTA UNIVERSITAS LAMPUNG”

“Yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman “

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin...

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M. Si selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Sahabat-sahabat Ngasul yang menemani perjalanan perjuangan ini, baik dalam study maupun karir saya, sebenarnya saya bingung nulis nama siapa yang duluan tapi yang pasti diurutan berapa tetap sama di hati saya, untuk Danang, Fina, Resti, Ken, Rian, Vika, Vivi, terimakasih sudah mau menjadi tempat saya curhat dan tempat saya bertukar pikiran selama ini, terima kasih juga sudah mendukung serta membantu saya dalam seminar hingga penyusunan skripsi ini. saya duluan ya sahabat semua, saya do'akan agar kalian segera menyusul, ingat!!! silaturahmi kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih.
7. Abang-abang dan mbak- mbak (Diki, Rifky, Bery, Cibi, Guntur, Meliansyah, Nekroma, Yoga, Rian, Kiki, Baihaki, Iful, Hafiz, Adit, Rido, Winda, Lia, miranti, dll.) Makasih Abang-abang dan mbak- mbak udah banyak memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Angkatan 2013 saudara seperjuangan mohon maaf saya lulus duluan ya, gua doain semoga cepet lulus dan nama kalian udah gua kasih gelar (M Ibnu Fadhil, Agnessia Diknas Pitaloka, Ipnika Nurfasari, Nadia Maudyna, Risky Nitha, Chici Afrianita, Putri Aphrodite, Defa Septia, Oca Pawalin, Rini Setiawati, Tri Arista, Syaidina/Aldo, Agung Rahmat, Novriko, Dormatio,

Tiara Dayu, Azizah, Maria, Novrizal, Irwansyah, Ardi, Yones, Agus Burman, Bima, Firginia, Ina Wijaya) terima kasih untuk waktu dan kebersamaan yang pernah mengisi keseharian penulis, semoga silaturahmi kita akan terus tetap terjalin dalam acara jalinan kasih.

9. Angkatan 2014 (Iranda Putri, Ulfa Umayasari, Miss Retno Ulandari, Devi Indriani, Bella Puspita Dwi Ranti, Asfhira Novthya, Debby Nurlita, Dita Maharani, Melda, Ezio, Cahyo,) mulai dari sekarang lebih disiplin dan harus lebih rajin ya dek.. semoga bisa segera menyusul menjadi sarjana.
10. Tim Lembaga Lampung Cerdas (Ahmad Nashirin, S.Ei, Ade Eka Safitri, S.Pd) terimakasih ya.. atas partisipasi, dukungan, serta motivasinya baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, serta tetap semangat dan komitmen ya.. supaya lembaga yang kita bangun bisa besar, sukses dan diakui dunia.
11. Untuk Adik-Adik dan Sepupu-Sepupuku (Madian Azhar, Wilda Yanti, Zikrul, Diki, Julio, Firdaus, Dartia, Emil, Evi, Eva, Mewa, Uda Tawan, Berta, Rendi, Qodri, Yori, Apen, Met, dll) terimakasih atas do'a dan dukungan kalian sehingga karya sederhana ini bisa segera selesai.
12. Saudara seperjuangan (Adit, Yudit, Sugeng, Kia, Tantri, Sofi, Robi, Ifan, Salma, Tiara, Adi Setiawan, Nopri Maroba, Abid Arinu Efendi, Putri Janati, Isna, Rani, Ari Widodo,) terima kasih atas perjuangan dan kebersamaan kita selama ini.. semoga kita tetap semangat dalam berkarya dan berbuat kebaikan.
13. Teman KKN Kebangsaan Universitas Lampung (Adlin Junando, Artha Kurnia Alam, Dita Paramitha, Eka Setiawati, Erika, Feni Priyanka, Hanifah Sherliana, Jaka Purnama, Karina Sylfia Dewi, M. Agung Hardianto, Rizky

Fitria Sari, Saroh, Tika Oktavia, Yucky Anggun A, Zirwan Siddik) ingat kita dipertemukan bukan karena kebetulan, tetapi kita di pertemukan karena perjuangannya, terimakasih ya atas kebersamaan kita selama ini, tetap jaga silaturahmi ya.. meskipun saya yang sering sulit untuk bersama kalian.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 17 April 2017

Penulis

Syaifulloh

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
B. Konsep Politik.....	12
C. Pemekaran Desa	16
1. Tinjauan Tentang Pemekaran	16
2. Syarat-Syarat Pemekaran Desa.....	19
3. Konsep Pemekaran.....	23
4. Konsep Otonomi Desa.....	26
D. Permasalahan Pemekaran	30
E. Sosial Ekonomi Masyarakat	31
F. Kerangka Pikir	34

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	39
B. Fokus Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis Data	45
E. Sumber Informasi	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Pengolahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data	50
I. Validasi Data	53

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gading Kencana	54
1. Sejarah Singkat Gading Kencana	54
2. Letak Geografis	54
3. Demografi	55
4. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Sosial Ekonomi	55
5. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Agama	56
6. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Jenis Kelamin	56
B. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Desa Gading Kencana ..	57
C. Potensi Desa Gading Kencana	60
D. Kronologi Pemekaran	61

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	64
1. Dimensi Politik	65
2. Dimensi Administrasi/teknis	66
3. Dimensi Kesenjangan Wilayah	68
4. Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Meningkatkan Infrastruktur Desa dan Meningkatkan Pendapatan atau Prekonomian Masyarakat	70
B. Pembahasan	74
1. Dimensi Politik	76
2. Dimensi Administrasi/teknis	80
3. Dimensi Kesenjangan Wilayah	82
4. Meningkatkan Pelayanan Terhadap Masyarakat, Meningkatkan Infrastruktur Desa dan Meningkatkan Pendapatan atau Prekonomian Masyarakat	84

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
1. Kerangka Pikir	37
2. Bagan Struktur Organisasi Desa Gading Kencana.....	58

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Jemlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian.....	55
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama	56
3. Pengelompokkan penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	56
4. Susunan Organisasi Desa Gading Kencana	57
5. Daftar Nama Ketua Rukun Keluarga (RK) desa Gading Kencana	59
6. Gedung Kantor	59
7. Inventaris dan alat tulis kantor	63
8. Batas Wilayah	60
9. Variabel	60
10. Trianggulasi Hasil Penelitian	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada tahun 1998, wilayah NKRI dibagi kedalam 27 Provinsi. Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat mengenai demokratisasi dan pemekaran wilayah, saat ini di Indonesia telah di bagi dalam 35 Provinsi baru juga di ikuti dengan adanya 416 daerah kabupaten dan 98 kota dalam satu provinsi yang mengalami pemekaran. Dengan demikian daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan dapat mengembangkan semua yang menjadi potensi daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mengedepankan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Ditegaskan kembali oleh Haryanto dalam jurnal yang berjudul Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik, Penambahan daerah otonom ini merupakan fenomena yang layak dikaji ulang. Sebab, pemekaran atau penambahan daerah otonom yang banyak terjadi di beberapa daerah di

Indonesia sekarang ini tidak didukung oleh Sumber Daya manusia (SDM) yang baik, akibatnya yang terjadi adalah tersendatnya roda pemerintahan daerah dan berantakannya tata pemerintahan, mencermati fenomena pemekaran wilayah di Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru hingga memasuki pemerintahan sekarang (Haryanto. *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik* .2009)".

Secara praktis, harus diakui bahwa kebijakan pemerintah untuk memekarkan beberapa daerah di Indonesia telah menambah angka permasalahan baru terutama dalam proses penyusunan Undang-undang dan sistem ketatanegaraan kita saat ini. Kebijakan untuk melakukan pemekaran daerah merupakan suatu tuntutan masyarakat yang merasa daerahnya dieksplorasi dan di eksploitasi pusat secara berlebihan. Oleh karena itu, hal inilah yang melatar belakangi pemerintah daerah untuk segera melakukan dan menyelenggarakan pemekaran wilayah, dengan segera mengajukan proposal dan berkas-berkas yang berkaitan dengan pemekaran daerahnya.

Banyaknya pemekaran wilayah yang didorong oleh derasnya tekanan politik dan perebutan kekuasaan. Tekanan kuat dari daerah itu direspon positif oleh pemerintah pusat, padahal dalam taraf proses pemekaran tersebut, setidaknya telah banyak memberikan beban terhadap pemerintahan pusat, beban yang fundamental adalah beban finansial penyelenggaraan pemerintahannya. Di setujuinya pemekaran wilayah dapat juga dimaknai bahwa akan adanya sebuah keharusan pemerintah pusat untuk mengalirkan dana ke pemerintah daerah yang baru.

Tersedianya jaminan politik bahwa pemerintah pusat akan mencukupi segala kebutuhan setidaknya pemerintahan daerah yang baru di bentuk, karena daerah

tersebut mendapatkan dana perimbangan, dan dalam hal khusus tertentu, berhak pula mendapatkan dana otonomi khusus. Pemaknaan sempit inilah yang kini sebenarnya menjadi beban dan problem bagi pemerintah daerah baru juga bagi pemerintah pusat. Seharusnya jika ingin ditinjau secara politik, para pemerintah daerah yang baru di bentuk tersebut dapat menjadikan daerahnya sebagai arena baru bagi perjuangan eksponen politik setempat, seperti tokoh agama, pewaris pemerintahan tradisional, dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini di tegaskan Bagir Manan dalam sebuah jurnal Martyan, Doroteus. 2014 menjelaskan “Otonomi adalah kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan”.

“Otonomi ditujukan untuk meningkatkan Pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh masyarakat di daerah, serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat, dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri (Martyan, Doroteus. 2014)”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan itu adalah adanya ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai suatu wujud dari proses

pelaksanaan otonomi. Pemekaran wilayah tersebut berupa pemekaran kecamatan dan pemekaran desa/kelurahan.

Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan serasi antara pusat dan daerah”. Terkait dengan pemekaran desa, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, Pasal 2 menyatakan bahwa: “Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan Pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa”. Sehingga Dengan adanya pemekaran desa, diharapkan pelayanan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik. Dari perubahan tersebut dampak yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan adanya pemekaran desa adalah masyarakat dapat lebih cepat dalam pelayanan dan lebih efisien dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan pada tahun 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Sebagai

kabupaten baru, infrastruktur kabupaten ini masih terbatas. Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi warga pendatang transmigran dari daerah Jawa, Sunda dan Bali. Mata pencarian utama penduduk adalah berkebun singkong, karet, sawit dan bertani.

“Seperti halnya beberapa daerah di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang Barat banyak dihuni suku pendatang seperti Jawa dan Sunda yang mayoritas beragama Islam dan Suku Bali yang menganut agama Hindu. Namun suku mayoritas di Tulang Bawang Barat adalah suku Jawa sehingga bahasa Jawa sangat umum digunakan oleh penduduk sebagai bahasa pengantar sehari-hari. Dimuat dalam <http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 14:23 WIB.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerja pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Komitmen tersebut diantaranya mendorong masyarakat di tiyuh-tiyuh yang layak dimekarkan untuk dapat membentuk pemerintahan tiyuh otonom. Sebagai realisasi komitmen tersebut, Selasa 15 maret 2016 Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad, SP melantik 7 penjabat (Pj) Kepalo Tiyuh Persiapan yang tersebar di 3 kecamatan. “Ini merupakan langkah penting yang menjadi bagian dari komitmen tersebut, sekaligus menjadi wujud pemenuhan aspirasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat di 7 tiyuh persiapan di 3 kecamatan tersebut,” Bupati Umar Ahmad, SP mengatakan, proses pembentukan tiyuh persiapan ini sudah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu, sementara usulan pemekarannya sudah ada yang disampaikan sejak tahun 2013 dan 2014.

“Peresmian 7 tiyuh persiapan ini dapat dimaknai sebagai simpul bersatunya antara komitmen pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat, yang memiliki keinginan yang sama untuk memajukan masyarakat dan daerah. Dimuat dalam

<http://www.lenteraswaralampung.com/berita-928-serius-bentuk-tiyuh-tujuh-kepalo-dilantik.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 14:40 WIB.

Kemudian Kepala bagian Tata pemerintahan A.Hariyanto menjelaskan, Program Pemekaran Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pelayanan aparatur kampung terhadap masyarakat agar pelayanan tersebut lebih maksimal. Saat ini kita terus berupaya untuk mempercepat proses pelengkapan data dan administrasi lainnya yang memang diperlukan jika sudah memenuhi syarat kemudian akan dilakukanya pengajuan kepusat agar Pemekaran Kampung tersebut bisa dilaksanakan. Dimua www.tulangbawangbaratkab.go.id/?page=berita&&no=1 diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 13:37 WIB.

Desa Marga Kencana merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang memiliki luas wilayah 1500 Hektar, dengan jumlah 4.671 jiwa, bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 2.315 jiwa, mayoritas berkebun karet. Di samping itu, terdapat 78 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 72 orang di swasta, 76 sebagai wiraswasta, 83 orang di bidang pertukangan, dan 127 orang sebagai buruh tani.

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk masyarakat Marga Kencana tersebut, membuat masyarakat untuk membentuk daerah otonomi Desa (tiyuh) Baru. Hal tersebut dalam rangka mengatur, mengurus wilayah dan rumah tangganya sendiri berdasarkan kemampuan serta potensi untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Selain alasan luas wilayah tersebut tentu terdapat beberapa alasan mendasar yang mendorong masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru.

Pemekaran desa ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat pelayanan kepada Masyarakat. Pelayanan masyarakat terutama dalam hal pelayanan publik merupakan aspek utama dalam hal hubungan pemerintah dengan masyarakat, seperti yang diketahui sebagai warga yang taat hukum diwajibkan mengikuti prosedur yang berlaku (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006). Namun yang terjadi di Marga Kencana bahwa banyak warga masyarakat yang enggan datang ke kantor desa untuk mengurus administrasi kependudukan mereka. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Ichwahyudi Salah satu tokoh Agama desa marga kencana pada saat Pra riset tanggal 7 Oktober 2016, beliau mengatakan banyak warga masyarakat jarang mengurus langsung administrasi kependudukan di kantor desa mereka cenderung meminta bantuan ketua RK atau bahkan ketua RT untuk mengurus administrasi kependudukan mereka.

Dugaan sementara penulis alasan yang lain adalah adanya unsur politik didalamnya selain itu, campur tangan elit lokal baik elit politik maupun non politik. Berbagai aktivitas dan kegiatan sosial masyarakat biasanya merupakan inisiatif dari tokoh elit desa. Elit desa juga berperan dalam mengontrol kebijakan pemerintah desa (tiyuh). Oleh karena itu, posisi elit dalam sebuah desa (tiyuh) sangatlah strategis. Namun, karena setiap desa memiliki nilai,

norma, dan budaya yang berbeda, maka macam aktor elit yang berperan dalam sebuah desa pun juga berbeda.

Kelompok elit yang secara implisit memiliki pengaruh terhadap masyarakat, mampu menjustifikasi berbagai isu dan mendorong reaksi warga terhadap isu tersebut. Namun, elit pasti memiliki sumber daya untuk menjalankan pengaruhnya. Sumber daya tersebut dapat berupa jabatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya. Tentu saja, elit yang berperan di Desa (*tiyuh*) Gading Kencana juga memiliki sumber daya strategis yang menjadi modal dalam mengelola pemekaran desa. Konsistensi elit dalam pemekaran Desa Gading Kencana sangatlah tinggi, mulai dari memunculkan isu pemekaran, memobilisasi massa, dan mediasi dengan eksekutif. Bahkan, berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu warga Desa Gading Kencana, ternyata sebelum menjadi desa, elit desa nekat menjual (disewakan) lahan untuk membangun Kantor Balai Desa.

Pemekaran suatu daerah atau desa seharusnya lahir dari keinginan masyarakat yang telah dimusyawarakan dan disepakati bersama dengan alasan mendasar untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga isu pemekaran yang di dengungkan akan mencapai tujuannya dan tidak akan terhenti pada kepentingan politik semata. Hal lain yang perlu dikaji adalah seringkali isu pemekaran selalu muncul dari atas (kaum elit) yang juga lebih memberikan keuntungan bagi kaum elit, padahal banyak warga yang juga ikut dalam memperjuangkan pemekaran. Inilah yang akan menjadi tujuan penting dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian melalui penulisan skripsi yang dikemas dalam judul “Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat turut mengembangkan khasanah kelimuwan dibidang ilmu pemerintahan yang berkaitan tentang politik Pemekaran desa.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi yang menambah wawasan di bidang politik Pemekaran desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait pemekaran desa dan atau kelurahan sebenarnya sudah banyak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan lebih menekankan pada sisi sikap politik masyarakat terhadap pemekaran dan lebih mengkaji pada dampak pemekaran. Salah satu contoh hasil penelitian yang berjudul *sikap politik masyarakat terhadap pemekaran kelurahan sepang jaya kota bandar lampung*. (Skripsi Andri Marta, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung , 2012).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andri Marta dapat dikemukakan bahwa sikap politik masyarakat terhadap pemekaran Kelurahan Sepang Jaya Kota Bandar Lampung cenderung masuk ke dalam kategori positif atau. mengetahui, menyetujui, mempercayai, dan mendukung pemekaran kelurahan tersebut. Uraian kategori responden yang memilih bertindak positif terhadap pemekaran Kelurahan Sepang Jaya yaitu sebanyak 73,2% atau 71 responden sedangkan sebanyak 26,8 % atau 26 responden memilih bertindak negatif terhadap pemekaran Kelurahan Sepang Jaya.

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan yang di lakukan peneliti saat ini yaitu terletak pada substansi permasalahannya. Peneliti saat ini lebih

mengkaji pada Implementasi pemekaran desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan Andri Marta lebih menekankan sikap politik masyarakat terhadap pemekaran kelurahan sepang jaya.

B. Konsep Politik

Politik saat ini sudah menjadi keharusan untuk kita pahami. Hal tersebut dikarenakan sudah hampir semua aktivitas dalam keseharian kita pasti tidak pernah tertinggal unsur politik di dalamnya. Sudah banyak para ahli menyikapi politik dengan berbagai pendapat diantaranya;

“David Easton dalam (Philipus, 2004: 90) mendefinisikan politik merupakan semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan itu dilakukan. Dipertegas oleh pernyataan Maran (dalam Susilo, 2003: 4) mengatakan, politik merupakan studi khusus tentang cara-cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan masalah lain. Dengan kata lain, politik merupakan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan. Menurut Surbakti tentang konsep politik yang merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu (Susilo, 2003: 5)”.

Berdasarkan berbagai definisi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa politik sebagai aktivitas yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijaksanaan serta aktivitas antara masyarakat dan pemerintah untuk tujuan bersama. Jones dalam (Dr. Muhadam Labolo, 2015) menjelaskan Dalam politik , istilah masalah kadangkala diartikan sederhana, suatu situasi yang berbeda antara harapan dan kenyataan, atau sesuatu yang menimbulkan kekacauan atau konflik atau ketidakstabilan/ketidakteraturan. Padahal, dalam banyak kasus, suatu masalah bahkan sering kali menciptakan keuntungan bagi orang lain (Dr. Muhadam Labolo, 2015). Selanjutnya Dahl dalam Analisa politik Modern (1994:

157-163) menyebutkan beberapa alasan mengapa seseorang berperilaku tidak mau terlibat dalam politik, jika :

1. Orang mungkin kurang tertarik dalam politik, jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dan keterlibatan politik, dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari aktifitas lainnya.
2. Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan.
3. Seseorang cenderung tidak terlibat dalam politik jika merasa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat merubah dengan jelas hasilnya.
4. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa hasilnya relatif memuaskan orang tersebut, sekalipun ia tidak berperan di dalamnya.

Ketika dilihat secara Etimologis yaitu kata politik ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti polisi dan kebijakan. Melihat kata kebijakan maka politik berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga politisi adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekkan perilaku-perilaku didalam politik tersebut. Oleh karena itu secara garis besar definisi atau makna dari politik adalah sebuah perilaku atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan dalam tatanan Negara agar dapat merealisasikan cita-cita Negara sesungguhnya, sehingga mampu membangun dan membentuk Negara sesuai *rules* agar kebahagiaan bersama didalam masyarakat disebuah Negara tersebut lebih mudah tercapai.

Berdasarkan buku yang berjudul “*Dasar-Dasar Ilmu Potilik*” Mariam Budiardjo 2008:16 menyatakan bahwa ada dua pakar politik yang menguraikan pengertian politik yang berhubungan dengan masalah konflik dan konsensus:

Rod Haque et al Politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif (*Politics is the activity by which groups reach binding collective decisions*) dan mengikat melalui usaha-usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*through attempting to reconcile differences among their member*).

Andrew Heywood Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum (*Politics is the activity through which a people make, preserve, and amend the general rules*) yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama (*under which they live and as such is inextricably linked to the phenomenon of conflict and cooperation*).

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani dan di ambil alih oleh banyak bahasa di dunia, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia. Pada zaman Yunani klasik, negara (*state*) atau lebih tepat negara kota (*city state*) di sebut “*polis*” (Adnan, 2007:4). Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Secara umum ilmu politik ialah ilmu yang mengkaji tentang hubungan-kekuasaan, baik sesama warga Negara, antar warga Negara dan Negara, maupun hubungan sesama Negara. Yang menjadi pusat kajiannya adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan tersebut dan juga bagaimana menghambat penguasaan kekuasaan.

Konsep-konsep pokok yang dipelajari dalam kajian politik :

- a. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempeunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
- b. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelakunya.
- c. Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan diantara beberapa alternative sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

- d. Kebijakan umum adalah kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.
- e. Pembagian adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, yang ditekankan bahwa pembagian selalu tidak merata sehingga timbul konflik. (Sumber: <http://file.upi.edu/Direktori/> , diakses pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 16:18 WIB).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ilmu politik adalah bermacam macam kegiatan dalam sistem suatu negara, yakni pengambilan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tujuan tertentu. Idealnya, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Mengenai sifat dari ilmu politik, dapatlah kita fahami dari beberapa definisi tentang ilmu politik.

Pada dasarnya ilmu politik paling erat kaitannya dengan ilmu negara. Yakni sama-sama mengupas dan menyelidiki hal-hal mengenai negara. Namun berbeda sifatnya, yakni ilmu negara menyelidiki dan mengajarkan teori-teori tentang asal mula negara, tujuan dan tugas negara, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan ilmu politik menyelidiki dan menguraikan hidup negara itu, sikap dan tanduknya dalam kehidupan warganya serta dalam pergaulan antar negara. Dengan kata lain, ilmu politik bersifat membahas proses-proses yang berlangsung dalam suatu negara, seperti kekuasaan dan susunan masyarakat. Sedangkan ilmu negara membahas tentang teori-teori terbentuknya negara dan struktur negara atau bentuk pemerintahan negara tersebut.

Mengenai ilmu politik tersebut, M. Hutauruk, SH dalam bukunya *Garis Besar Ilmu Politik* Pelita Keempat, berpendapat bahwa: ilmu politik menyelidiki dan

mempelajari proses-proses dalam pemerintahan dan masyarakat yang berintikan aktivitas, kompetisi dan kerjasama dalam memupuk dan menggunakan kekuasaan.

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat dirumuskan sifat ilmu politik tersebut:

1. menentukan prinsip-prinsip yang dijadikan patokan dan yang diindahkan dalam menjalankan pemerintahan.
2. mempelajari tingkah laku pemerintah sehingga dapat mengemukakan mana yang baik, mana yang salah dan menganjurkan perbaikan perbaikan secara tegas dan terang.
3. mempelajari tingkah laku politik warga negara itu, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok.
4. mengamati dan menelaah rencana-rencana sosial, kemakmuran, kerjasama internasional, dan sebagainya.

Sistem politik bersifat terbuka, yakni terbuka untuk pengaruh dari luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lain. Maksudnya politik tersebut dapat berinteraksi dan berubah dengan lingkungannya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi contohnya tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan masyarakat.

C. Pemekaran Desa

1. Tinjauan Pemekaran Desa

Istilah pemekaran berasal dari kata asalnya, yaitu mekar yang bisa diartikan sebagai berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, dan mulai timbul dan berkembang. Tri Ratnawati memberikan definisinya bahwa pemekaran adalah "cara pusat untuk memecah daerah dan menguasainya (*devide and rule*) seperti yang banya dipraktikan oleh penjajah kolonialisme di masa lalu (Tri Ratnawati. 2009: 35). Peranan pemerintah daerah sebagai ajang

untuk pembentukan jati diri, pencarian pengalaman, serta pemahaman awal tentang penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kenyataan yang sangat sulit untuk dinafikan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, telah terjadi pergeseran paradigma dari *Rule Governance* di mana dalam pembangunan dan pelayanan publik senantiasa menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, hingga sekarang menjadi *Good Governance* yaitu tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya melibatkan pemerintah atau negara semata, tetapi harus melibatkan internal maupun eksternal birokrasi.

Desa harus menjadi kekuatan ekonomi agar warganya tidak hijrah ke kota. Sepinya masyarakat di desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri. Walau lahan sudah menjadi milik kota, bukan berarti desa lemah tak berdaya. Desa adalah kekuatan sejati. Negara harus berpihak pada para petani.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul *pemerintahan desa dan Administrasi desa* menyatakan bahwa “Desa adalah Suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia” (Widjaja, 2002: 19).

Wilayah desa adalah “suatu kesatuan wilayah yang tertentu batas-batasnya, yang secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kepulauan, suatu perairan, sebagai alokasi pemukiman dan sumber nafkah, yang memenuhi persyaratan tertentu” (Drs. Taliziduhu Ndraha, 1991: 15). Desa menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H dalam bukunya yang berjudul *“Desa Kita”* menyatakan bahwa: Desa adalah Suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah

penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia” (Kansil, 2003: 23).

Desa menurut Sumber Saparin dalam bukunya yang berjudul *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan desa*” menyatakan bahwa:

Desa sebagai masyarakat hukum mengalami perkembangan dalam suatu jangka waktu tertentu ialah dari sebuah Desa induk pecah menjadi anak-anak desa yang memisahkan diri guna membentuk kelompok baru dengan kesatuan tempat tinggal tersendiri.

Selanjutnya berbicara pembentukan dan pemekaran wilayah baru, maka undang-undang yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana undang-undang ini merupakan undang-undang terbaru sebagai revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sementara pembahasan terkait tentang desa saat ini yang sudah di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi.

2. Syarat-Syarat Pemekaran Desa

Pembentukan desa, baik pemekaran, penghapusan dan penggabungan desa di jelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 dan selanjutnya terkait syarat - syarat Pembentukan desa baru tertera dengan lengkap dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa diantaranya:

- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu:
 - 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;

- 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enamratus) kepala keluarga;
- 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (limaratus) kepala keluarga;
- 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
- 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;
dan
- 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

- f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemekaran desa pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Dengan adanya pemekaran diharapkan dapat menciptakan kemandirian suatu daerah yang akan dimekarkan. Tujuan pemekaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi.
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian.
4. Percepatan pengelolaan potensi suatu daerah.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban.

Pada tataran normatif, kebijakan pemekaran wilayah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, kepentingan politik seringkali lebih dominan dalam berbagai proses pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini. Proses pemekaran wilayah pun menjadi bisnis politik dan uang. Akibatnya, peluasan daerah pemekaran seringkali diwarnai indikasi

terjadinya KKN. Kepentingan substansif, yakni peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap pembangunan ekonomi mempunyai potensi besar untuk tidak diindahkan.

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan maupun pemekaran desa di wilayah Sumatera yakni:

Pertama, faktor penduduk, minimal 4000 jiwa atau 800 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan

kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

3. Konsep Pemekaran

Menurut Djohan (1990: 120-130), dalam sebuah buku yang berjudul *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal* menguraikan konsep pemekaran daerah menjelaskan bahwa terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam pemekaran daerah adapun penjelasan rinci terkait 3 (Tiga) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Dimensi Politik

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonomi sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antara daerah dengan pusat (Dahl, 1989). Dimensi politik dari pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisasi sebagai bagian dari suatu landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik, sebagai bagian dari suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik (Dahl, 1989).

Dimensi politik memiliki beberapa faktor, yaitu :

a. Faktor Geografis

Factor geografis yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan identitas suatu kelompok masyarakat yang akhirnya akan berkembang menjadi satu kesatuan politik. Geografi menjadi batas yuridiksi wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom.

b. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang member perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Faktor ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan mungkin saja keagamaan.

c. Faktor Demografi

Faktor demografi, yaitu faktor yang mengasumsikan bahwa homogenitas penduduk akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis. Jika faktor homogenitas ini dikolaborasikan dengan kesatuan secara geografis, maka secara politis kekuatan pembentukan kesatuan masyarakat tersebut

akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya daerah otonom (Smith, 1985).

d. Faktor Sejarah

Faktor yang keempat, adalah faktor sejarah, faktor ini mengasumsikan, bahwa struktur pemerintahan masa lalu dari suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi suatu daerah otonom.

2. Dimensi Administrasi/Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakni akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang membentuk geografis (Mutalib, 1987). Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif (Sharpe, 1979).

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Kasus penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah sering terjadi ketidakseimbangan perkembangan antar daerah. Ada daerah yang menjadi sangat maju, tetapi sebaliknya ada daerah yang relative

tidak berkembang dan bahkan mengalami kemunduran. Konsep inilah yang melandasi pemikiran hubungan antara daerah dalam melihat persoalan pembentukan daerah otonom. Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang ditelantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasikan, untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom sendiri agar dapat secara bebas mengembangkan dan mengelola daerah mereka.

4. Konsep Otonomi Desa

Dalam Sebuah Jurnal yang berjudul evaluasi wilayah pemekaran desa gamba raya di kecamatan kelam permai kabupaten sintang , Doroteus Martyan, 2014 menyatakan bahwa:

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa dianggap sebagai kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat. Jadi istilah "otonomi desa" lebih tepat bila diubah menjadi "otonomi masyarakat desa" berarti kemampuan yang benar-benar tumbuh dari masyarakat desa (Doroteus Martyan 2014).

Mashuri Maschab berpendapat jika dilihat dalam konteks politik, sebagai Kesatuan masyarakat hukum desa mengurus kehidupan mereka secara mandiri (Otonom), dan wewenang untuk mengurusdirinya sendiri itu sudah

dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpadiberikan oleh orang atau pihak lain. (Mashuri Maschab, 2013: 29)

Dalam sebuah jurnal yang berjudul konsep pemerintahan desa dalam politik hukum Didik Sukriono menyatakan bahwa Otonomi bukan sekadar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan administrasi negara. Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.
2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Pada bagian lain *Bagir Manan* menyatakan, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Artinya kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan.

Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekadar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan.

Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi. Sementara itu *Bhenyamin Hoessein* mengartikan otonomi hampir paralel dengan pengertian “*demokrasi*”, yaitu pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar Pemerintah Pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam arti sempit. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan, sebab baik otonomi maupun tugas pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada otonomi, kebebasan dan kemandirian itu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan baik asas maupun cara menjalankannya. Sedangkan pada tugas pembantuan, kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

Berdasarkan makna otonomi di atas, dalam kajian ini menggunakan konsep otonomi Bagir Manan, yakni otonomi merupakan kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Artinya

kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi . Dengan dimulai dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2004: 166).

D. Permasalahan Pemekaran

Syafarudin (2010: 50-55) menyebutkan faktor penyebab langsung maupun tidak langsung munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru dapat diidentifikasi dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

“Pertama, manipulasi data awal dan proses pembentukan. Apabila daerah pemekaran baru benar-benar memenuhi syarat dan memenuhi semua prosedur substantif maka problem pasca pemekaran bisa dihindari. Kuat dugaan bahwa selama ini ada pemaksaan dan manipulasi syarat-syarat teknis, administrasi, dan kewilayahan. Politik uang (*money politics*) di tingkat lokal dan nasional, meski sulit untuk dibuktikan, nampaknya kuat sekali menjadi faktor memuluskan persyaratan dan memenuhi prosedur formal.

Kedua, nafsu politik elit lokal dan nasional memberangus kesadaran kolektif. Walaupun daerah tidak layak dimekarkan, namun kenyataannya hampir semua riset kampus dan lembaga penelitian menyatakan layak 179 daerah untuk dimekarkan. Nafsu elit lokal dan nasional memekarkan wilayah demi motif ekonomi dan politik ini didukung pula dengan sikap DPR dan DPD sebagai penyambung aspirasi rakyat. Akibatnya kesadaran kolektif hilang, tenggelam oleh histeria/euforia politisi dan massa yang ikut-ikutan terbuai bayang-bayang kenikmatan pemekaran daerah.

Ketiga, kemandirian fiskal yang dijamin UU bagi daerah-daerah pemekaran seperti DAU, bagi hasil dari SDA, PAD, dll. Salah satu sebab terjadinya gelombang pemekaran daerah karena adanya jaminan dalam UU 32/2004, PP 129/2000, dan PP 78/2007 bahwa daerah baru hasil pemekaran akan memperoleh DAU (dana alokasi umum) dari pusat. DAU pusat diharapkan turun sebanyak-banyaknya ke daerah yang akan dipergunakan untuk membangun. Kenyataan ini semakin ironis mengingat PAD daerah minim dan banyak mengandalkan pembiayaan pembangunan dari pusat. Akibatnya daerah makin banyak bergantung ke pusat dan APBN pusat kini mengalami *“bleeding”* (Syafarudin, 2010).

E. Sosial Ekonomi Masyarakat

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.

Dalam sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. dimuat dalam <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> , diakses pada tanggal 24 Juni 2016, pukul 09:24 WIB.). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat.

“Ilmu-Ilmu Sosial adalah ilmu-ilmu yang mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai obyek yang dipelajari. Ilmu-ilmu sosial belum mempunyai kaidah-kaidah dan dalil-dalil tetap yang diterima oleh bagian besar masyarakat, oleh karena ilmu-ilmu tersebut belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah manusia yang selalu berubah-ubah (Suwarno 2012:8). Selain itu, Soerjono Soekanto juga berpendapat Ilmu sosial (*Social*) pada ilmu-ilmu sosial mempunyai arti yang berbeda dengan misalnya istilah sosialisme atau istilah sosial pada departemen sosial. Apabila istilah sosial pada ilmu sosial merujuk pada obyeknya yaitu masyarakat, sosialisme adalah suatu ideologi yang berpokok pada prinsip kepemilikan umum (atas alat-alat produksi dan jasa-jasa dalam bidang ekonomi) (Soerjono Soekanto 1999: 14)”.

Ilmu sosial yang masih sangat usianya, baru sampai pada tahap analisis dinamika, artinya baru sampai pada analisis-analisis tentang masyarakat manusia dalam keadaan bergerak. Mungkin dari ilmu ekonomi dapat dikatakan bahwa perkembangannya telah meningkat pada taraf kemungkinan.

“Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Dimuat dalam <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> , diakses pada tanggal 24 Juni 2016, pukul 09:24 WIB).

Sonny Sumarsono mendefinisikan Ilmu Ekonomi Positif Adalah Suatu teori tentang tingkah laku yang mana masyarakat bertipe menganggap untuk

menanggapi keuntungan dan biaya yang negatif (Sonny Sumarsono 2009 : 1). Dalam sebuah jurnal yang berjudul *hubungan antar kondisi sosial ekonomi* yang di susun oleh budhiati, halaman 55 menjelaskan bahwa Kondisi Sosial Ekonomi Menurut Conyers (1991: 5) kata sosial ekonomi mengandung pengertian sebagai sesuatu yang non moneter sifatnya yang bertalian dengan kualitas kehidupan insani. Sedangkan ekonomi dijelaskan sebagai lawan dari pengertian sosial yaitu dilibatkan kaitannya dengan uang.

Pada dasarnya Pembangunan manusia suatu konsep yang mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif untuk menopang hidup, yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan pembangunan manusia yang lebih baik, yang akan menciptakan manusia yang lebih terdidik dan sehat, tidak mengalami kelaparan dan memiliki kemampuan berpartisipasi dalam lingkungan sosial.

Dalam paradigma pembangunan Sosial ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Hal ini di tegaskan Todaro dkk , kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Adapun indikator kesejahteraan masyarakat yaitu meliputi:

Pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik; dan *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. (Todaro Michael, 2000).

F. Kerangka Pikir

Setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Pemekaran Desa merupakan salah satu upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

Dengan adanya pemekaran desa ini diharapkan koordinasi menjadi lebih mudah. Adanya pemekaran desa ini tentunya menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini dikarenakan desa menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas. Fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada RK maupun RT menjadi tanggung jawab Desa. Oleh karena itu pengembangan lembaga desa menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Disamping itu sikap masyarakat yang semakin kritis terhadap kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah itu sendiri.

David Easton dalam (Philipus, 2004: 90) mendefinisikan politik merupakan semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan itu dilakukan. Hal ini kembali di uraikan oleh Djohan (1990: 120-130), dalam sebuah buku yang berjudul Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal menguraikan konsep pemekaran daerah menjelaskan bahwa terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam pemekaran daerah adapun penjelasan rinci terkait 3 (Tiga) dimensi tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Dimensi Politik
2. Dimensi Administrasi/Teknis
3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Ketiga Dimensi tersebut dipakai untuk melihat pengaruh tentang pemekaran daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan penggabungan

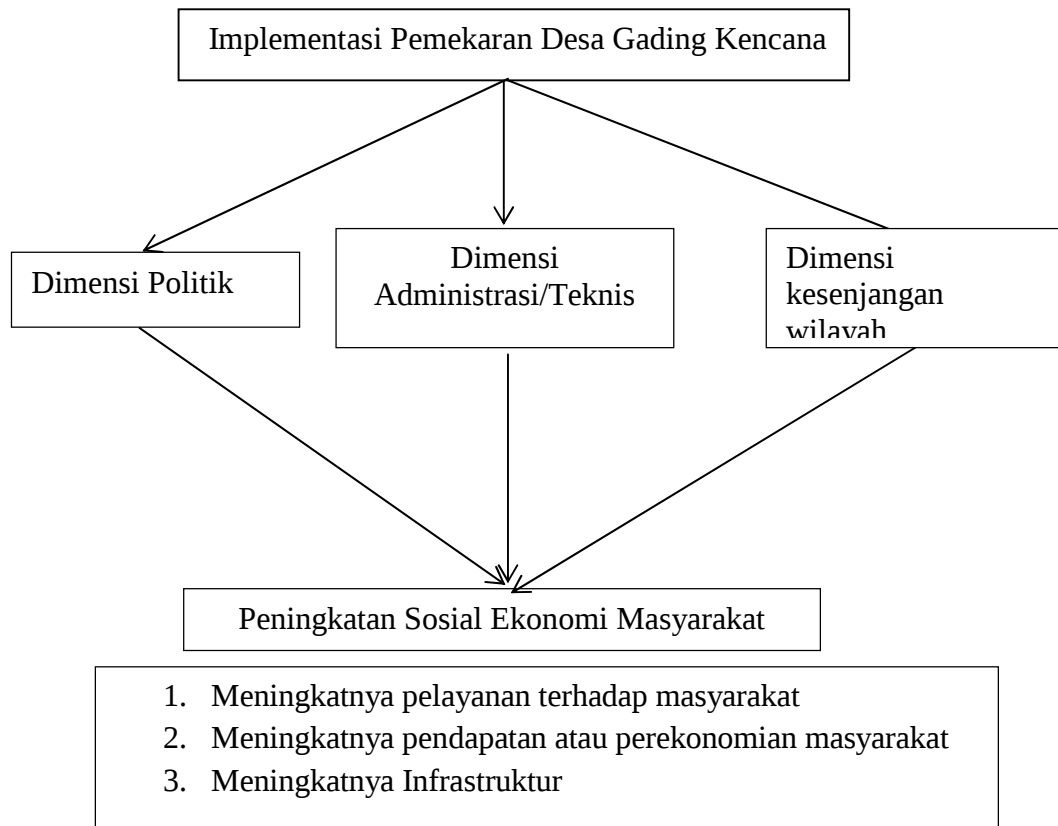
Desa/Kelurahan yang terdiri dari aspek politik, Adminstratif/Teknis, dan Kesenjangan wilayah. Selain dari pada itu di tinjau juga menggunakan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa.

Salain itu, untuk mengetahui peningkatan sosial ekonomi masyarakat, peneliti menggunakan indikator kesejahteraan masyarakat yang di paparkan oleh todaro Michael, 2000. Adapun indikator-indikator tersebut yaitu sebagai berikut;

1. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan;
2. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;

Maka dengan menggunakan konsep yang di jelaskan David dan konsep Todaro serta menghubungkan ketiga konsep tersebut maka akan diketahui politik Pemekaran Desa Gading Kencana dalam peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki permasalahan yang cukup kompleks, yaitu Implementasi Pemekaran Desa Daging Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang saat ini terlihat terdapat unsur politik dalam proses pemekarannya. Oleh karena itu, setelah menyusun kerangka pikir, peneliti akan menentukan metode dalam penelitian ini. Tujuan penelitian bab ini adalah untuk menentukan cara peneliti dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Pembahasan dimulai dengan menentukan tipe penelitian, fokus penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan teknik penarikan kesimpulan data. Semua pembahasan tersebut didukung dengan referensi-referensi termutakhir terkait metode penelitian dalam politik dan pemerintahan.

Secara umum metode penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah. Intinya penelitian adalah pemberian masukan yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan untuk membuat sebuah keputusan (Sekaran dalam Raco, 2010:5-6).

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat. Melihat dari Permasalahan dan Judul tersebut maka tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif. Penelitian ini dapat dikatakan kualitatif sebab penelitian ini menggunakan pendekatan yang memdeskripsikan fenomena secara mendalam terperinci dan dikarenakan menggunakan homogenitas sampling.

Berkenaan dengan penelitian Kualitatif, Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Bogdan dan Taylor (1975: 27) dalam Moleong (2012: 3) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian pendekatan kualitatif dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajian. Hal ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi langsung kepada masyarakat.

Penelitian ini juga tidak terlepas pada pengumpulan dan penyingkapan fakta semata, akan tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data. Data yang dideskripsikan adalah politik dalam pemekaran Desa Gading Kencana.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diangkat. Dalam penelitian kualitatif, masalah diistilahkan dengan fokus penelitian yang kemudian diturunkan menjadi pertanyaan penelitian (Santana, 2007:46). Oleh karena itu, fokus penelitian perlu ditetapkan guna membatasi penelitian dan berfungsi pula untuk memenuhi suatu informasi yang diperoleh di lapangan.

Berdasarkan teori dan Kerangka pikir/konsep yang terdapat pada tinjauan pustaka, tergambar dengan jelas bahwa fokus penelitian ini hanya mengkaji dan menganalisis secara mendalam implementasi politik pemekaran desa gading kencana dengan menggunakan konsep yang di kemukakan David Easton dalam (Philipus, 2004: 90) mendefinisikan politik merupakan semua aktivitas yang mempengaruhi kebijaksanaan itu dilakukan. Dengan menggunakan konsep ini, di harapkan peneliti bisa menguraikan dan mengkaji secara mendalam terkait hal-hal politik yang berhubungan dengan implementasi politik pemekaran Desa Gading Kencana.

Selain menggunakan konsep diatas, peneliti juga menggunakan konsep yang di kemukan Djohan, 1990 tentang konsep pemekaran daerah. Djohan

Menguraikan dalam Pemekaran daerah dan lain-lain terdapat 3 (Tiga) Dimensi dalam sebuah pemekaran yaitu;

1. Dimensi politik

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Desa Gading Kencana benar-benar berdasarkan ide maupun aspirasi langsung dari masyarakat. Dengan kata lain, pemekaran desa gading kencana terjadi akibat kemaunan seluruh atau mayoritas masyarakat setempat, atau apakah keinginan sekelompok tokoh masyarakat, elit politik dan pemerintah daerah.

2. Dalam Dimensi Administrasi/Teknis

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Desa Gading Kencana telah memenuhi dan telah sesuai dengan persyaratan – persyaratan pemekaran desa yang berlaku, khususnya pada bidang administrasi. Dengan kata lain, pemekaran desa gading kencana terbentuk dikarenakan sudah memenuhi persyaratan pemekaran desa yang terdapat pada Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014.

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai seberapa besar kesenjangan dan ketimpangan social, ekonomi pada masyarakat desa marga kencana. Dengan kata lain, apakah berdirinya desa gading kencana dikarenakan ketimpangan maupun kesenjangan social ekonomi masyarakat yang terdapat di desa Induk yaitu desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Kemudian untuk mengetahui Peningkatan sosial ekonomi masyarakat, peneliti memfokuskan pada indikator-indikator sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Desa Gading Kencana telah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Gading Kencana. Dengan kata lain, apakah pemekaran desa gading kencana sudah berhasil menciptakan peningkatan pada pelayanan terhadap masyarakatnya, seperti; untuk pengurusan kependidikan dan lain-lain.

2. Meningkatnya Pendapatan Atau Perekonomian Masyarakat

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Desa Gading Kencana telah meningkatkan pendapatan maupun perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, apakah pemekaran desa gading kencana sudah mengurangi tingkat pengangguran dan telah menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang berada didesa gading kencana.

3. Meningkatnya Infrastruktur Desa

Indikator yang digunakan adalah untuk menilai apakah pemekaran Desa Gading Kencana telah meningkatkan infrastruktur Desa. Dengan kata lain, apakah pemekaran desa gading kencana sudah meningkatkan atau melakukan perbaikan berbagai infrastruktur seperti; jalan utama, gang-gang jalan, kantor desa, gedung-gedung untuk kepentingan desa dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pemakaran diatas terlihat dengan jelas bahwa Fokus penelitian sangatlah penting dalam sebuah penelitian. Moleong (2012 : 97) Menjelaskan Memfokuskan dan membatasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya tentatif. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan penting.

Pertama, suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong. Implikasinya, peliti seyogianya membatasi masalah studinya yang bertumpu pada fokus. Hal ini yang memungkinkan adanya acuan teori dari suatu penelitian. *Kedua*, Fokus pada dasarnya adalah masalah fokus yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Sebab harus diperhatikan bahwa ketika dilapangan akan ditemui banyak data yang menarik, namun jika dipandang tidak relevan data itu harus dihiraukan. Namun demikian dalam penelitian kualitatif fokus penelitian tidaklah bersifat permanen melainkan dapat berubah sebab dengan adanya perubahan terhadap fokus penelitian dapat berarti bahwa penelitian yang dilakukan jauh lebih dapat dipahami dan lebih meningkat.

Pada penelitian ini, fokus penelitian yang diarahkan adalah melihat Implementasi Politik Pemekaran Desa terhadap Sosial Ekonomi pada Desa *Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan peneliti dengan sengaja. Menurut Moleong (2012: 86) dalam penentuan lokasi penelitian cara yang baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian, sebagai pertimbangan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Marga Kencana sebagai desa Induk sebelum dimekarkannya Desa Gading Kencana. Dengan luas wilayah 1500 Hektar, dengan jumlah 4.671 jiwa, bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 2.315 jiwa, mayoritas berkebun karet. Di samping itu, terdapat 78 orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 72 orang di swasta, 76 sebagai wiraswasta, 83 orang di bidang pertukangan, dan 127 orang sebagai buruh tani. Dan Desa Gading Kencana Itu sendiri dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut memiliki permasalahan yang relevan dengan judul serta mudah dijangkau. Selain itu banyak proses pembelajaran di bidang pemerintah yang dapat diambil manfaatnya.

Berkaitan dengan uraian di atas, penentuan lokasi penelitian yang penulis tentukan merupakan lokasi penelitian melakukan pemekaran desa pada tahun 2015-2016 yang lalu, sehingga penulis menemukan kemudahan untuk mengetahui dan memahami peran elit politik dalam pemekaran Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

dan mengetahui motivasi elit politik dalam pemekaran Desa Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan gambar-gambar yang didapatkan dari dokumen-dokumen, pengamatan dan tulisan-tulisan, gambar-gambar atau foto (Neuman, 2014:477). Sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder (Morse dalam Flick, 2014:166). Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Nur Edi,S.Ag | Kelapa Desa Marga Kecnana |
| 2. Tafsir | Kepala Desa Persiapan Gading Kencana |
| 3. Muhkoji Bahtiar | Ketua Panitia Pemekaran |
| 4. Asroni, S.Pd | Sekretaris Camat Tulang Bawang Udik |
| 5. Ichwahyudi | Masyarakat |
| 6. Dani | Masyarakat |

Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen berupa; Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Desa (Tiyuh) Persiapan Gading Kencana, Proposal Usulan Pembentukan Desa (Tiyuh) Gading Kencana

kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Profil Desa Marga Kencana, profil Desa Persiapan Gading Kencana dan liputan berita lenteraswaralampung.com.

E. Sumber Informasi

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dimana informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan keperluan penulisan penelitian yang memang mewakili sumber informasi yang ingin didapatkan oleh penulis. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini antara lain:

- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 1. Nur Edi,S.Ag | Kelapa Desa Marga Kecnana |
| 2. Tafsir | Kepala Desa Persiapan Gading Kencana |
| 3. Muhkoji Bahtiar | Ketua Panitia Pemekaran |
| 4. Asroni, S.Pd | Sekretaris Camat Tulang Bawang Udik |
| 5. Ichwahyudi | Masyarakat |
| 6. Dani | Masyarakat |

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh berbagai data tersebut, maka dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang penting dalam penelitian, namun dalam sebuah penelitian tidaklah cukup hanya sekedar mengumpulkan data, tetapi juga harus menganalisanya. Dalam pendekatan kualitatif untuk melakukan sebuah penelitian, analisis dapat dimulai sementara dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, namun analisis

tersebut cenderung tentatif dan tidak lengkap, karena data yang terkumpul nantinya dipakai sebagai informasi yang valid dan representatif untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Husaini Usaman dan Purnomo Setiady Akbar dalam bukunya yang berjudul Metode penelitian Sosial menyatakan bahwa Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang di wawancarai disebut *interviewee*.(Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2009: 24)

Teknik tersebut akan dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan kepada narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas.

Hal ini bertujuan memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data dokumentasi yang belum dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita dari obyek yang akan diteliti tersebut. Proses wawancara tersebut dibantu dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data. Adapun hasil wawancara terlampir di bagian lampiran.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan benar-benar berguna (Moleong 2006:173) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Adapun pelaksanaan yang digunakan berupa mengamati objek penelitian secara langsung yakni implementasi politik pemekaran Desa Dading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain itu peneliti juga melakukan pencatatan tentang hasil pengamatan atas gambaran-gambaran yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan peninggalan tertulis mengenai data berbagai kegiatan atau kejadian yang dari segi waktu yang relatif belum terlalu lama (Silaen dan Widiyono, 2013:163). Sumber Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Desa (*Tiyuh*) Persiapan Gading Kencana, Proposal Usulan Pembentukan Desa (*Tiyuh*) Gading Kencana kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Profil Desa Marga Kencana, profil Desa Persiapan Gading Kencana dan liputan berita lenteraswaralampung.com.

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh dari lapangan dan terkumpul semua maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut.

1. *Editing Data*

Editing data adalah sebuah proses yang bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Dalam tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama Pihak-pihak yakni Kepala Desa Marga Kencana selaku Kepala Desa induk, Kepala Desa Gading Kencana, Ketua Panitia Pemekaran Desa Gading Kencana, Wakil Camat Tulang Bawang Udik, dan Masyarakat yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi serta dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan ejaan yang di sempurnakan (*EYD*). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Neuman, 2007:328). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang terdiri dari beberapa langkah yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata, tindakan peneliti dan peristiwa di kehidupan sosial.

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data mengenai

persyaratan dan proses pemekaran Desa Gading Kencana Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peneliti mewawancarai informan yakni Kepala Desa Marga Kencana selaku Kepala Desa induk, Kepala Desa Gading Kencana, Ketua Panitia Pemekaran Desa Gading Kencana, Wakil Camat Tulang Bawang Udik, dan Masyarakat menggunakan pertanyaan yang sama tiap kriteria informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti. Peneliti membuang jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian-penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Kegiatan lanjutan peneliti pada penyajian data adalah data yang didapat disajikan dalam bentuk table dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu.

3. Menarik kesimpulan

Berdasarkan pemulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti berde-a-beda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Penelitian ini yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Dan kesimpulan akhir muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian. Proses reduksi data dan penyajian data telah dilakukan, peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi politik pemekaran Desa Gading Kencana untuk segera dievaluasi karena kriteria-kriteria dimensi politik, dimensi administrasi/teknis dan dimensi kesenjangan wilayah yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Proses pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan yaitu data mentah, kemudian ditulis kembali dalam bentuk dan kategori data, setelah

data mengalami proses reduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis dan diperiksa keabsahannya untuk disimpulkan.

I. Validasi Data

Menurut Moleong (Purhantara, 2012:102-103), trianggulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Di dalam penelitian ini, teknik trianggulasi yang digunakan peneliti adalah Trianggulasi metode, yaitu teknik menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Seperti halnya di dalam penelitian ini yang menggunakan metode wawancara yang dilengkapi dengan metode observasi, serta studi dokumen.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gading Kencana

1. Sejarah Singkat Gading Kencana

Desa Gading Kencana merupakan pecahan dari dua desa yaitu desa marga kencana dan desa kantong karta sari (gajah mati). Satu pemukiman yang ditempati oleh mayoritas warga transmigrasi. Adapun asal pemberangkatan terdiri dari beberapa rayon atau daerah provinsi pengiriman seperti, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa (*tiyuh*) Gading Kencana merupakan bagian dari kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun dan 16 Rukun Tetangga (RT). Pada hari selasa tanggal 15 maret 2016 desa gading kencana di sahkan menjadi desa persiapan oleh Bupati Tulang Bawang Barat.

2. Letak Geografis

Dasa Gading Kencana memiliki luas wilayah 762,15 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa (*tiyuh*) Kagungan Ratu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dayamurni dan Daya Asri

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Marga Kencana dan Daya Asri
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karta Harja dan Karta

Secara geografis Desa Gading Kencana merupakan daerah daratan dan sebagai besar lahan pemukiman yakni seluas 762,15 Ha, kemudian sebagian lain untuk perkebunan, persawahan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran dan sarana prasarana lainnya.

3. Demografi

Penduduk Desa Gading Kencana terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen). Berdasarkan data proposal usulan pembentukan Desa (*Tiyuh*) Gading Kencana dan data Profil Desa Gading Kencana jumlah penduduk Desa Gading Kencana adalah 2.996 jiwa. Penduduk Desa Gading Kencana sebagian besar berasal dari etnis Jawa dan Lampung.

4. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Sosial Ekonomi

Sebagian besar penduduk Desa Gading Kencana bermata pencarian petani/perkebunan, buruh tani, buruh harian lepas, pedagang, PNS, polisi, TNI, dll, hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No	Mata pencarian	Jumlah
1	2	3
1	Petani	1.185
2	Buruh Tani	45
3	Pegawai Negeri Sipil	68
4	Pedagang	94

1	2	3
5	TNI	2
6	Polisi	2
7	Buruh harian lepas	239
8	Lain-lain	150
Jumlah		1785

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

5. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Agama

Penduduk Desa Gading Kencana sebagian besar memeluk agama Islam.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	2	3
1	Islam	2958 orang
2	Kristen Protestan	6 orang
3	Katholik	16 orang
Jumlah		2980 orang

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

6. Penduduk Desa Gading Kencana Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Pengelompokkan penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	2	3
1	Laki-laki	1465 orang
2	Perempuan	1531 orang
Total		2996 orang

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

B. Gambaran Umum Pemerintah dan Perangkat Desa Gading Kencana

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik didukung perangkat Desa yang berjumlah 5 orang dengan susunan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Susunan Organisasi Desa Gading Kencana

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Tapsir	PJ Kepala Desa Persiapan
2	Hasanudin	Sekretaris
3	Riyanto	Kaur Pembangunan
4	Rosi, S. Ag	Kaur Keuangan
5	Turaji	Kaur Administrasi

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

Pemerintah Desa Gading Kencana terdiri dari :

a. Kepala Desa

Kepala Desa Persiapan diangkat dan dipilih oleh Bupati atas usul masyarakat Gading Kencana yang memenuhi syarat.

b. Perangkat Desa

1. Sekretaris Desa

Kedudukan dari Sekretaris Desa yaitu sebagai staf pembantu Kepala Desa dan pemimpin Sekretariat kelurahan sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

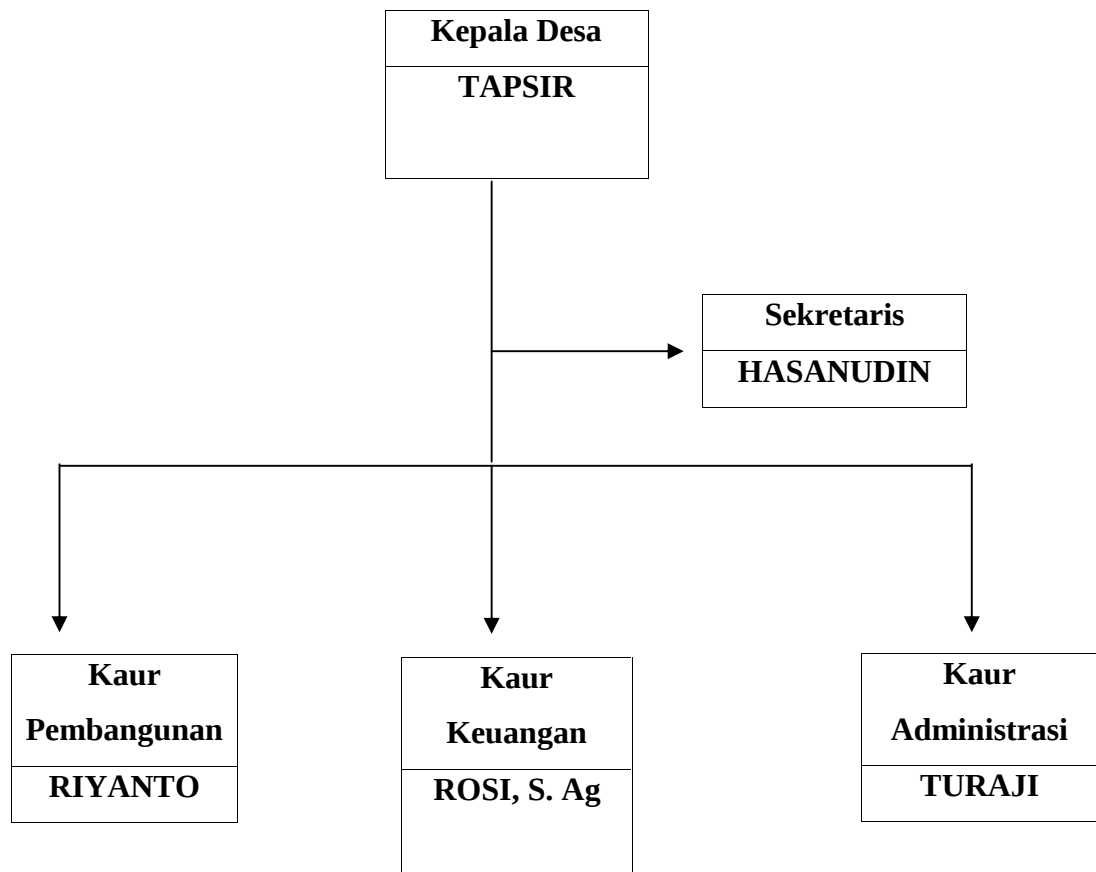
2. Kepala Urusan (*Kaur*) Desa

Tugas pokok Kaur desa yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi

pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, struktur organisasi Pemerintahan Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik tahun 2016 sampai sekarang dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA GADING KENCANA KECAMATAN TULANG
BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Desa Gading Kencana
(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

Desa Gading Kencana terbagi menjadi 4 Empat) Dusun (RK)) seperti padatabel berikut ini :

Tabel 5. Daftar Nama Ketua Rukun Keluarga (RK) desa Gading Kencana

NO	RUKUN KELUARGA	RK
1	2	3
1	Sahid	RK 1
2	Jumadi	RK 2
3	Sugiyanto	RK 3
4	Samsu Kandar	RK 4

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

Untuk menunjang tugas dan tanggung jawabnya, perangkat desa di Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik memiliki sarana dan prasarana pemerintahan desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.6 Gedung Kantor

No	Gedung Kantor	Keterangan
1	Kondisi	Sewa
2	Jumlah ruang kerja	-
3	Balai Kelurahan	-
4	Listrik	Ada
5	Air Bersih	Ada
6	Telepon	-

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

Tabel 7. Inventaris dan alat tulis kantor

No	Jenis	Jumlah
1	Mesin Tik	-
2	Meja	3 buah
3	Kursi	8 buah
4	Almari arsip	1 buah
5	Komputer	1 unit
6	Mesin fax	-
7	Kendaraan dinas	-

(Sumber: Profil Desa Gading Kencana 2017)

C. Potensi Desa Gading Kencana

1. Potensi Sumber Daya Alam

Tabel 8 . Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Kagungan Ratu
Sebelah Selatan	Dayamurni dan Daya Asri
Sebelah Timur	Marga Kencana dan Daya Asri
Sebelah Barat	Karta Harja dan Karta

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

2. Variabel Data Desa

Tabel 9 . Variabel

No.	Variabel	Satuan	Data
1	LuasDesa/Tiyuh	Km2	762,15 Ha
2	Kondisi Fisik Geografis	-	Datar
3	Luas sawah yang dialiri	Ha	316
4	Luas sawah tadah hujan	Ha	2
5	Produksi padi sawah	Ha	5,20 Ton
6	Masjid	-	4 unit

7	Mushola	-	10 Unit
8	Sekolah Dasar	-	1 Unit
9	Tanah Pemakaman Umum	-	2075 M2
10	Taman Pendidikan Anak	-	2 Unit
11	Taman Pendidikan Al-Qur'an	-	4 Unit
12	Tanah Persiapan Kantor Desa	-	500 M2
13	Sarana Olah Raga	-	4 Unit

(Sumber: Data Profil Desa Gading Kencana 2016/2017)

D. Kronologi Pemekaran

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Peresmian dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pada awalnya Kabupaten Tulang Bawang Barat terbentuk terdiri dari 8 kecamatan. Kemudian melalui perjalanan yang panjang kabupaten berhasil membentuk 1 (satu) kecamatan baru yang bernama Kecamatan Batu Putih. Selain dari pada itu, berdasarkan komitmen pemerintah Tulang Bawang Barat untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka dengan itu pula juga pemerintah Kabupaten melakukan pemekaran-pemekaran desa untuk dengan harapan dapat memperkecil tingkat kesenjangan social ekonomi masyarakatnya.

Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan salah 1 (satu) kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang bawang Barat, pada tahun 2016 lalu, Kecamatan

Tulang Bawang Udik melakukan pemekaran desa baru yang bernama Desa Gading Kencana. Pembentukan Desa Gading Kencana adalah mulanya hasil pemekaran dari desa Induk Marga Kencana.

Desa Marga kencana yang semula memiliki 5 Rukun Keluarga (RK) yang kemudian rukun keluarga 1 dan rukun keluarga 2 di inisiasikan untuk di mekarkan dengan di gabungkan dengan salah satu Dusun gajah mati yang terdapat pada Desa Karta Sari. Dengan demikian Kedua RK yang berada di desa marga kencana dan dusun gajah mati yang berasal dari desa karta sari di bentuklah menjadi satu desa yaitu Desa Gading Kencana.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pemekaran desa yang dilakukan oleh Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan tuntutan yang mutlak dalam konteks ekonomi daerah yang dicanangkan pemerintah. Program pemekaran desa merupakan salah satu upaya pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka lebih mengefektipkan rentang kendali pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai upaya lebih meningkatkan kemajuan dan kemandirian pada struktur pemerintahan dan kemasyarakatan dari suatu desa - desa yang baru dibentuk.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai proses pemekaran Desa Desa Gading Kencana, bahwa pada proses pemekaran desa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan

Status Desa menjadi Kelurahan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai syarat-syarat dalam pemekaran desa.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Politik Pemekaran Desa Gading Kencana Dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat, sebagai berikut:

1. Dimensi Politik menunjukan terdapat intervensi politik yang kuat dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan elit Politik Masyarakat untuk Memekarkan Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Dimensi Administrasi/Teknis menunjukan pemekaran Desa Gading Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah memenuhi syarat administrasi. Akan Tetapi Kelayakan Tersebut dikarenakan Gabungan dari Desa Marga Kencana RK 1 dan RK 2 dan Desa Karta Sari Dusun Gajah Mati.
3. Dimensi Kesenjangan Wilayah menunjukan dengan adanya pemekaran Desa Gading Kencana membuat rentang kendali Semakin Baik, serta akan Memberikan pelayanan yang lebih efektif, serta jarak masyarakat akan menjadi lebih dekat ke kantor Kepala Desa. Khususnya mendekatkan dusun Gajah Mati untuk mengurus seluruh urusan terkait kependudukan.

4. Pemekaran Desa Gading Kencana baru menunjukkan peningkatan pada bidang Infrastruktur jalan raya. Akan Tetapi Pemekaran tersebut Belum menunjukkan adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan belum terdapat peningkatan pada pendapatan dan perekonomian masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saat melakukan proses pemekaran desa di harapkan agar dapat mengutamakan dan memenuhi segala persyaratan-persyaratan pemekaran yang sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, serta Pemekaran tersebut harus mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakat.
2. Peneliti menyarankan agar seluruh desa yang akan melakukan proses pemekaran desa dapat mensosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat serta dapat melibatkan masyarakat agar tujuan utama dari pemekaran desa itu dapat berjalan dengan baik.
3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya untuk dapat mengembangkan penelitian ini pada kajian politik pemekaran desa dengan metode-metode yang mutakhir serta teori-teori yang relefan pada masa penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adnan. 2007. *Ilmu Politik*. Sultan Amai Press. Gorontalo.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahl, Robert. 1994. *Analisis Politik Modern*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Djohan, Djohermansyah. 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Flick, Uwe dkk. 2014. *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- J. Moleong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Desa Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2015 *Dinamika Politik & Pemerintahan Lokal*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Limited.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Maschab. Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. PolGov, Yogyakarta.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Raco, J R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Cikarang: PT Grasindo.

- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Saparin, Sumber. 1997. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial : Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: In Media.
- Suwarno. 2012. *Teori Sosiologi*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Susilo, Suko dan Basrowi, dkk. 2003. *Sosiologi Politik*. Yayasan Kampusina. Surabaya.
- Sujamto. 1993. *Perspektif Otonomi Daerah*. Rinika Cipto. Jakarta.
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Santana, Septiyawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1999. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tulang Bawang Barat. 2014. *Profil Kecamatan Se- Kabupaten Tulang Bawang Bawang Barat*. Bagian Humas Setdakab Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat.
- Todaro Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta. Erlangga.
- Usman, Husaini. Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Universitas Lampung. 2015. *Pormat Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Philipus, Ng dan Nurul Aini. 2004. *Sosiologi Politik*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Widjaja, H. AW. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, H. AW. 2001. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, H. AW. 2004. *Otonomi daerah dan Daerah Otonom*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 166 hlm.

Jurnal:

- Budhiati. 2011. *Hubungan antar kondisi sosial ekonomi*. (Jurnal). Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Vol. 3, No. 2, Hal 55.
- Haryanto. 2009. *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*. (jurnal). Universitas Gajah Mada. Vol. 13, No. 2, Hal. 131-148.
- Martyan, Doroteus. 2014. *Evaluasi wilayah pemekaran desa gemba raya di kecamatan kelam permai kabupaten sintang*, (Jurnal). Universitas Tanjungpura. Vol. 3, No. 4.
- Syafarudin. *Gelombang Pemekaran Daerah Pasca Orde Baru*. Laporan Penelitian. Arti Bumi Intaran. 09 November 2010 Pukul 15.00 WIB. syafar@unila.ac.id.
- Sukriono, Didik. *Konsep Pemerintahan Desa Dalam Politik Hukum*. (Jurnal). Universitas Kanjuruhan Malang.

Undang- Undang:

- Peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Website:

<http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 14:23 WIB.

<http://www.tulangbawangbaratkab.go.id/?page=berita&&no=1> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 13:37 WIB.

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Politik.pdf , diakses pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 16:18 WIB.

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> , diakses pada tanggal 24 Juni 2016, pukul 09:24 WIB.

<http://www.lenteraswaralampung.com/berita-928-serius-bentuk-tiyuh-tujuh-kepalo-dilantik.html> diakses pada tanggal 24 Juni 2016 pukul 14:40 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Marga_Kencana,_Tulang_Bawang_Udik,_Tulang_Bawang_Barat diakses pada tanggal 12 Oktober 2016 pukul 11:10 WIB.